



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Nomor : W17-U4 / 300 / OT.00/2/2022

T E N T A N G
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI KETAPANG

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Ketapang di pandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para Pelanggan Pengadilan;
 - b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah pada masing - masing bidang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II.**

Pertama : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Ketapang wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

Kedua : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar

Pelayanan...

- Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang.
- Ketiga : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan waktu pada pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasinya berupa souvenir dari Pengadilan.
- Keempat : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada Kantor Pengadilan Negeri Ketapang.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : K E T A P A N G
Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG



EGA SHAKTIANA



**LAPORKAN APABILA ANDA TIDAK
MENDAPATKAN PELAYANAN PRIMA**

- Petugas tidak melayani dengan seyum,salam, sapa
- Petugas tidak melayani sesuai prosedur
- pembayaran panjar perkara tidak disertai kuitansi

Maka Anda Berhak Mendapatkan

**SOUVENIR
MENARIK**

Atas Laporan Anda Yang Kami Tindak Lanjut

PTDA
Kantor Pengaduan Nasabah Kempang



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

NOMOR : W17-U4/62 /KP.04.5/1/2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA, PENGAWAS, PEJABAT
PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 2. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melalui satu pintu;
 3. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang perlu untuk menunjuk Atasan Pejabat Pengelola, Pengawas, Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Ketapang.

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

5. Surat...

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026 /KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/ SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PENUNJUKKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA, PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: W17-U4/602/KP.04.5/7/2021 tentang Penunjukkan Atasan Pejabat Pengelola (PTSP), Pengawas, Pejabat Pengelola (PTSP), Penanggung Jawab (PTSP) Dan

Petugas

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 12 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;

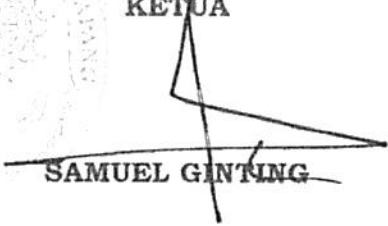
KEDUA : Menugaskan nama yang tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan prima berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam uraian jabatan dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola, Pengawas, Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas Memberikan pelayanan yang Prima, Akuntabel, Dan Anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Ketapang
Pada Tanggal : 6 Januari 2022
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
KETUA


SAMUEL GINTING

LAMPIRAN : PENUNJUKKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA, PENGAWAS, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB DAN
 PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
 Nomor : W17-U4 / G2 / KP.04.5 / 1 / 2022
 Tanggal : 6 Januari 2022

NO	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	SAMUEL GINTING S.H., M.H.	Pembina Tk. I / (IV/b)	Ketua	Atasan Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
2.	ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Hakim	Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
3.	AGUS ERWIN HARAHAP, S.H., M.H.	Pembina / (IV/a)	Panitera	Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Kepaniteraan / Supervisi	
4.	BUDIONO	Penata Tk. I / (III/d)	Sekretaris	Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Keseekretaratan / Supervisi	
5.	WISESA, S.H.	Penata / (III/c)	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Kepaniteraan Pidana	
6.	SEDIYAN	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Kepaniteraan Perdata dan Bagian Kepaniteraan Hukum	
7.	LENI HERMANANINGSIH, S.H.	Penata / (III/c)	Panitera Pengganti/ Plt. Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Kepaniteraan Hukum	
8.	SARJONO	Penata / (III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian Umum dan Keuangan	
9.	RAHMAD DODONG JUNAIDI MS, S.H.	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Plt. Kepala Sub Bagian PTIP	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian PTIP	

10.	IIP MURDHIANSYAH, S.H.	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Kepala Sub Bagian KEPORTALA	Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bagian KEPORTALA
11.	INDAH PUJI ASTUTI, S.H.	Penata Muda / (III/a)	Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengaduan/Pelaporan dan Kepaniteraan Hukum
12.	STEPANUS LIDO SIMAMBELA	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Pidana
13.	NOLA MELIA OVI UTAMI, A.Md.Kom	Pengatur / (II/c)	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perdata dan Petugas E-Court
14.	UTOMO, S.M.	Penata Muda / (III/a)	Jurusita / Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Keseekretariatan

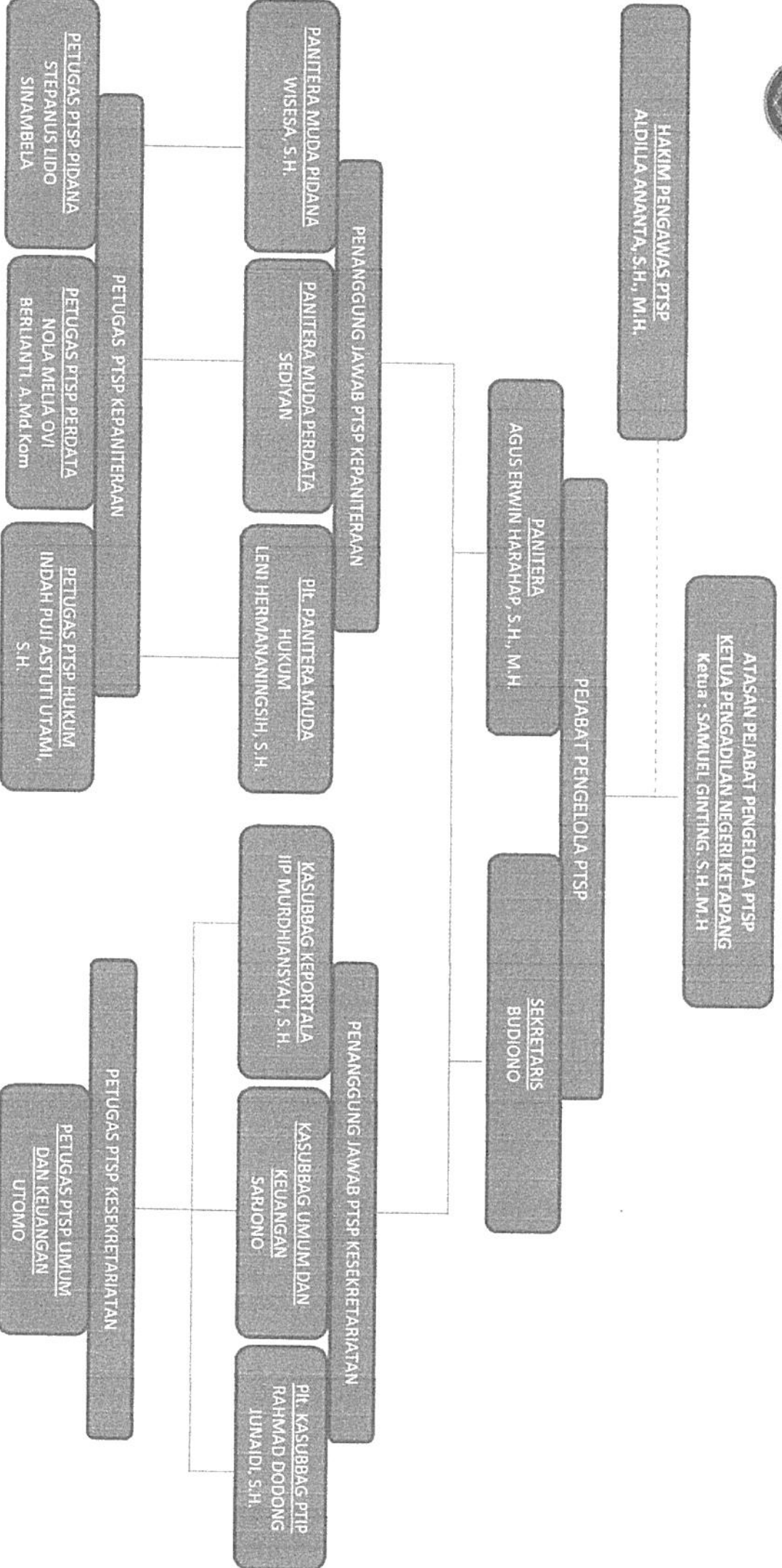
PENGADILAN NEGERI KETAPANG

KETUA


SAMUEL GINTING



STRUKTUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI KETAPANG







PELAYANAN TERPADU SATU PINTU+ PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Super Administrator

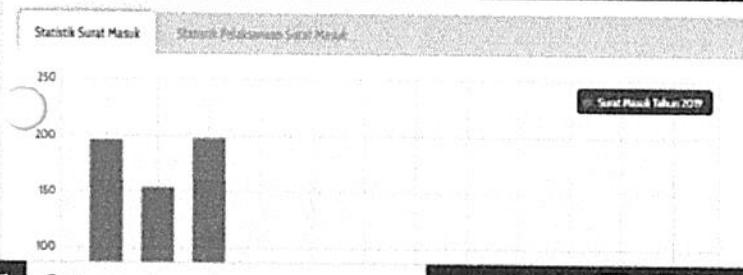


Super Administrator
Super Administrator

SELAMAT DATANG Super Administrator LOGIN SEBAGAI SUPER ADMINISTRATOR

Summary statistics for 2022:

- Surat Pengantar Tahun 2022: 545
- Surat Keluar CPNS 2022: 274
- Surat Seleksi dan CPNS 2022: 250
- TAMU TAHUN 2022: 32



Data Surat Masuk belum Disposisi/Olakanakan

Show 10 entries

Tgl Register	Nomor Surat	Pergum	Status
No matching records found			



Login Pendaftaran Perkara Online

Belum punya password ? Klik disini untuk mendaftar
Sudah Daftar belum mendapatkan Link Aktivasi di email
silahkan tekan atau sudah
mendaftar dan aktivasi namun gagal login karena lupa
password silahkan tekan



Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

eraterang

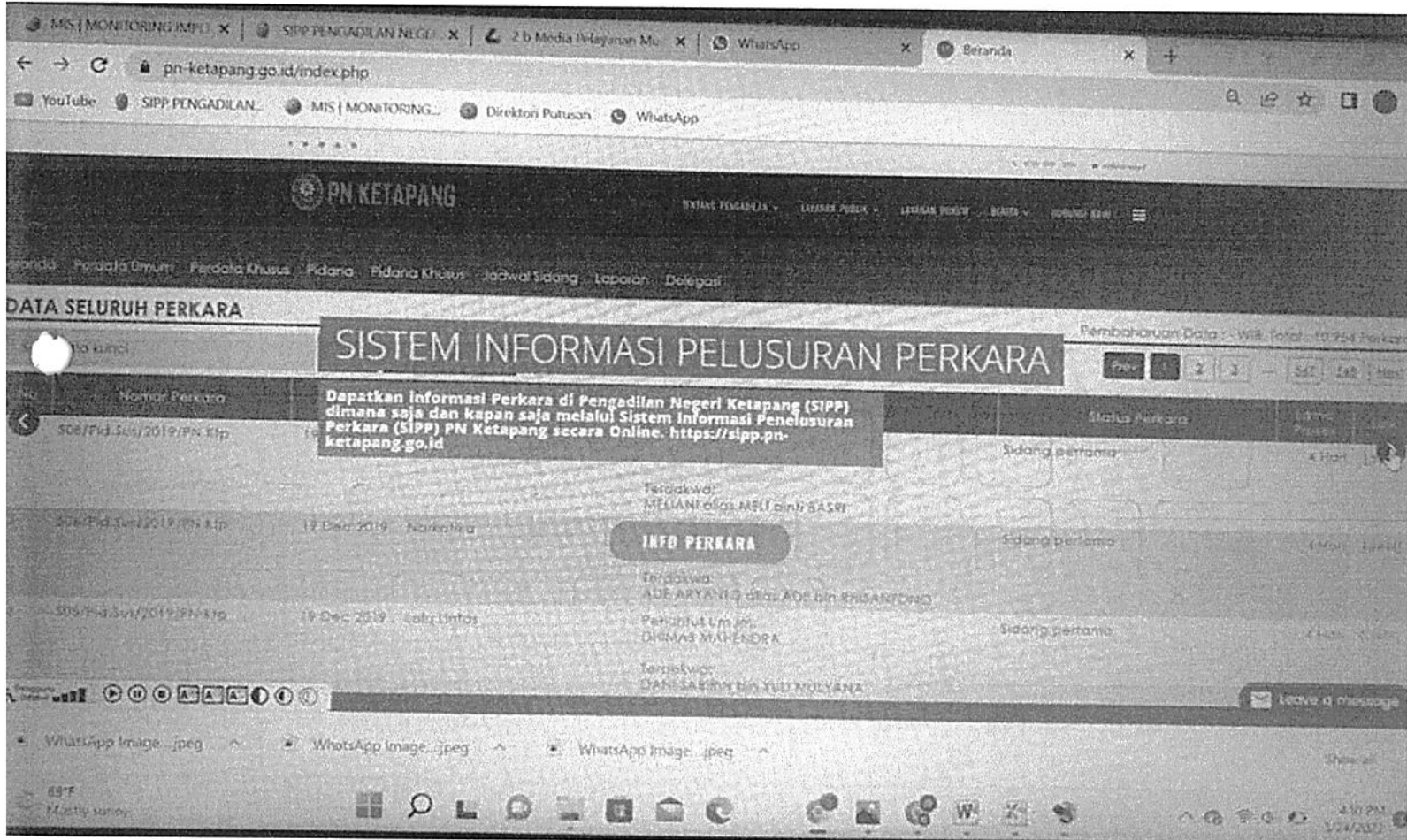
Elektronik Surat Keterangan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI

 Saya bukan robot 

Lupa Password? [Reset Password](#)

Kirim Ulang Aktivasi? [Kirim Aktivasi](#)

Belum menjadi Pengguna? [Daftar dengan email](#)



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

DATA SELURUH PERKARA

Pembaharuan Data - WBL Total : 17.163 Perkara

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	147/Pid.Sus/2022/PN Klp	23 Mar 2022	Lain-Lain	Penuntut Umum: JOSUHUA GUMANTI SITORUS SH Terdakwa: NASUTION Alias GALEK Bin. ASNOL alm	Sidang pertama	1 Hari	[Link]
2	145/Pid.B/2022/PN Klp	23 Mar 2022	Penggelapan	Penuntut Umum: JOSUHUA GUMANTI SITORUS SH Terdakwa: MURHAMMAD REKA SAPTIANSYAH Bin Alim NANANG YUSWANSYAH	Sidang pertama	1 Hari	[Link]
3	144/Pid.B/2022/PN Klp	23 Mar 2022	Penggelapan	Penuntut Umum: JOSUHUA GUMANTI SITORUS SH Terdakwa: MURHAMMAD REKA SAPTIANSYAH Bin Alim NANANG YUSWANSYAH	Sidang pertama	1 Hari	[Link]